

Analisis Kebijakan Dan Tata Kelola Desa Wisata Di Kabupaten Sinjai

Atifah Hikmawati, Umar Congge, Fitrawati AB

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: atifahhikmawati27@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the policies and governance of tourism villages in Sinjai Regency. The method used is a qualitative approach through in-depth interviews and direct observation of local governments, village governments, tourism village managers, and the community. The results of the study indicate that the direction of tourism village development policies in Sinjai Regency has had local potential-based planning through official regulatory basis, namely Regent's Decree Number 156 of 2020. Area arrangement is carried out through potential identification and administrative selection. Management is facilitated through training and mentoring programs from the Tourism Office. Supervision is carried out in a participatory manner through field visits and reporting, but the supervision aspect has not been supported by a sustainable monitoring system. Tourism village governance shows dynamics between villages in institutional capacity, potential attractions, availability of amenities, quality of human resources, partnerships, and promotional strategies. Panaikang Village shows institutional functioning, attraction management, and partnerships. Barania Village shows human resource strengthening and active promotion, while Tompobulu Village faces challenges in institutions and infrastructure. Synergy between the Regional Government and Village Governments has been established, but remains limited by budget constraints, capacity constraints, and suboptimal promotion. The conclusion of this study confirms that although tourism villages in Sinjai Regency have a policy and institutional framework that supports the development of sustainable destinations based on local potential, increased inter-institutional synergy, innovation in promotion, and strengthening of infrastructure and oversight are needed to ensure sustainable development, regional competitiveness, and optimal economic and social benefits for village communities.*

Keywords: *Policy, Governance, Tourism Villages*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan tata kelola desa wisata di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola desa wisata, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengembangan desa wisata yang terdapat di Kabupaten Sinjai telah memiliki perencanaan berbasis potensi lokal melalui landasan regulasi resmi yaitu SK Bupati Nomor 156 Tahun 2020. Penataan kawasan dilakukan melalui identifikasi potensi dan seleksi administratif. Pengelolaan difasilitasi melalui pelatihan dan program pendampingan dari Dinas Pariwisata. Pengawasan dilakukan secara partisipatif melalui kunjungan lapangan dan pelaporan namun pada aspek pengawasan belum didukung sistem monitoring yang berkelanjutan. Tata kelola desa wisata menunjukkan dinamika antar desa dalam kapasitas kelembagaan, potensi daya tarik, ketersediaan amenities, kualitas sumber daya manusia, kemitraan, dan strategi promosi. Desa Panaikang menunjukkan keberfungsian kelembagaan, pengelolaan daya tarik, dan kemitraan. Desa Barania menunjukkan penguatan SDM dan promosi yang aktif, sedangkan Desa Tompobulu menghadapi tantangan pada kelembagaan dan infrastruktur. Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa telah terbangun, namun masih dibatasi oleh kendala anggaran, kapasitas, dan promosi yang belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun desa wisata di Kabupaten Sinjai telah memiliki dasar kebijakan dan kelembagaan yang mendukung pengembangan destinasi berkelanjutan berbasis potensi lokal namun dibutuhkan peningkatan sinergi antar kelembagaan, inovasi dalam promosi, serta penguatan infrastruktur dan pengawasan agar desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan, bersaing secara regional, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih optimal bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Kebijakan, Tata Kelola, Desa Wisata.

Received Apr 12, 2026; Revised May 02, 2026; Accepted May 20, 2026

* Atifah Hikmawati: Email: atifahhikmawati27@gmail.com

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dan pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Pengembangan desa wisata, sebagai bagian dari ekosistem pariwisata, memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat desa, memperkuat identitas lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya. Kebijakan pengembangan pariwisata ini didasarkan pada keinginan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kebijakan pengembangan pariwisata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum utama serta acuan dalam upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata yang mencakup berbagai hal yaitu tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, selain berfokus pada keuntungan ekonomi, sektor pengembangan wisata juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pengembangan destinasi pariwisata yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemberdayaan masyarakat lokal serta peningkatan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM), pada bidang pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata Indonesia di dunia internasional melalui promosi yang efektif. Sektor pariwisata di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan perekonomian negara. Dalam kuartal ketiga perekonomian nasional Tahun 2024, bidang pariwisata berkontribusi 4.01 % bagi Produk Domestik Bruto (PDB), angka tersebut meningkat 0.11% dibandingkan periode pada Tahun 2023 (Ekon.go.id, 2025).

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan adanya triple T-revolution yaitu *Technology*, *Telecommunication*, *Transportation*, dan *Tourism* dinilai akan membawa perubahan yang memberikan dampak yang luas terhadap seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga akan berdampak pada bidang pariwisata, yang sudah semestinya untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dengan Desa sebagai garda terdepan dalam upaya pembangunan sektor saat ini. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan program Desa Wisata. Pengembangan wisata desa yang ditandai dengan adanya potensi lokal yang beragam diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat melalui penerapan pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan program desa wisata secara lebih serius melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan beragam inisiatif serta dukungan, seperti pelatihan untuk masyarakat desa, pengembangan infrastruktur, dan program sertifikasi Desa Wisata. Hal ini bertujuan agar semua desa wisata dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Berdasarkan data dari situs Jaringan Desa Wisata (Jadesta). Kemeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif per 10 November 2024, terdapat 6.042 destinasi wisata di berbagai provinsi. Destinasi tersebut terdiri dari 4.703 destinasi wisata rintisan, 992 destinasi wisata berkembang, 314 destinasi wisata maju, dan 33 destinasi wisata mandiri. Jumlah ini meningkat 28.14 % dibandingkan dengan 4.715 destinasi wisata pada tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah. Peningkatan jumlah destinasi wisata ini diharapkan dapat mendorong pendapatan penduduk, hal ini karena destinasi wisata dapat mendorong adanya usaha kecil seperti homestay, warung makan, penyewaan perlengkapan wisata, dan penjualan souvenir lokal yang secara langsung dapat memberikan penghasilan bagi penduduk lokal.

Di Kabupaten Sinjai, pengembangan desa wisata telah diupayakan, salah satunya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 156 Tahun 2020 tentang Desa Wisata

terkait penetapan nama-nama desa wisata yang mengatur aspek Penataan, Pengelolaan, dan Pengawasan desa wisata. Ketiga desa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Panaikang, Barania, dan Tompobulu, yang memiliki potensi wisata berbasis alam dan budaya yang berbeda. Penataan desa-desa ini didasarkan pada potensi lokal serta mengikuti mekanisme penetapan yang bertujuan agar desa-desa ini dapat dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam mendukung upaya untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Sinjai telah melakukan pendampingan dan pembinaan pada Desa Wista melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang beranggotakan masyarakat setempat sebagai garda terdepan untuk mengeksplorasi potensi desa wisatanya, selain itu dilakukan juga pelatihan yang menggali potensi masyarakat yang berguna dalam memajukan industri pariwisata di desanya. Desa wisata yang telah memiliki potensi untuk bersaing dengan desa wisata di daerah lain diikutkan dalam berbagai ajang lomba desa wisata untuk mempublikasikan sekaligus sebagai benchmarking dan menumbuhkan motivasi terhadap desa wisata yang lain di Kabupaten Sinjai.

Berbagai studi terdahulu menegaskan bahwa keberlanjutan desa wisata sangat bergantung pada pengelolaan kelembagaan yang kuat, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, dan promosi yang inovatif berbasis potensi lokal. Menurut Anggraini, F. S. S., Ati, N. U., dkk, (2023), pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi destinasi pariwisata. Penelitian tersebut menekankan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan. Sementara Menurut Palupi, S., Bahri, A. S., (2024), peningkatan kapasitas tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengembangan desa wisata. Mereka menekankan bahwa kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan potensi lokal secara aktif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan yang terletak pada fokusnya lebih mendalam terhadap aspek analisis kebijakan dan tata kelola desa wisata, terutama dalam konteks keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tentang tantangan, kebijakan, serta implementasi tata kelola desa wisata yang berkelanjutan, termasuk aspek regulasi, proses perencanaan, pengelolaan, pelatihan, dan pengawasan di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan berbagai aspek dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, aksesibilitas, promosi, kemitraan, peran pemerintah desa dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang berbasis potensi lokal sesuai karakteristik wilayahnya. Penelitian ini juga menyoroti dinamika aktual seperti keterbatasan kapasitas SDM sebagai hambatan nyata di lapangan, serta sinergitas pemerintah daerah dan pengelola desa wisata.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sinjai serta menawarkan arah kebijakan yang lebih efektif dan adaptif sesuai kondisi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam kebijakan, tata kelola, dan sinergitas pengembangan desa wisata di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada pengelola desa wisata, pemerintah desa, pemerintah daerah serta stakeholder terkait untuk mendapatkan informasi detail tentang kebijakan dan tata kelola serta sinergitas dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai kondisi fasilitas, aktivitas pengelolaan. Data yang diperoleh kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan berdasarkan kategori, kemudian diinterpretasikan secara naratif untuk menyusun gambaran menyeluruh tentang kondisi pengelolaan desa wisata, promosi, serta hambatan yang terjadi. Hasil analisis ini kemudian diverifikasi kembali melalui diskusi internal dan cross-check dengan informan agar data yang disajikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengorganisasian data, kategorisasi berdasarkan tema, interpretasi naratif, serta penarikan kesimpulan yang memperlihatkan pola dan hubungan antar data. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, serta tiga desa wisata yaitu desa wisata Panaikang, Desa Wisata Barania, dan Desa Wisata Tompobulu. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi, tantangan, dan sinergitas dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Sinjai secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan upaya pengembangan desa wisata yang terarah serta berkelanjutan, pemerintah kabupaten Sinjai telah melakukan penetapan sejumlah desa sebagai kawasan desa wisata melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 156 Tahun 2020 tentang Penetapan kawasan Desa Wisata di Kabupaten Sinjai. SK ini tidak hanya akan berfungsi sebagai dokumen legal formal, akan tetapi juga menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menata, mengelola, dan mengawasi desa wisata. Sementara itu, tata kelola (*governance*) mengkaji bagaimana aktor-aktor yang terlibat baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lainnya berinteraksi, mengambil keputusan, serta membentuk mekanisme koordinasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari pemerintah daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 156 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan potensi lokal desa wisata secara berkelanjutan. Pembahasan berikut akan memaparkan indikator-indikator yang berhubungan dengan aspek penataan ruang dan potensi wisata (penataan), mekanisme dan struktur pengelolaan desa wisata (pengelolaan), serta dukungan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai maupun lembaga dari desa (pengawasan).

Penataan

Penataan mencakup pengaturan atau peyesuaian ruang yang sesuai dengan potensi serta karakteristik lokal daerah. Dalam upaya mengembangkan desa wisata, penataan kawasan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi serta daya tarik wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Penataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek perencanaan, yang berfungsi sebagai dasar arah pengembangan destinasi secara strategis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait dalam upaya Penataan desa wisata Penataan desa wisata di Kabupaten Sinjai diawali melalui perencanaan strategis yang berbasis potensi lokal dan karakteristik wilayah. Proses ini mencakup pengisian data pada platform Jadesta, verifikasi oleh Dinas Pariwisata, hingga penetapan melalui Surat Keputusan Bupati. Perencanaan yang sistematis ini menjadi fondasi dalam menentukan kelayakan desa untuk dikembangkan, sekaligus memastikan penataan kawasan dilakukan secara terarah, representatif, dan berkelanjutan, meskipun belum ditopang oleh regulasi daerah yang spesifik

Pengelolaan

Pengelolaan mengacu pada serangkaian tindakan, perencanaan, dan pengaturan yang dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengelola desa wisata agar berfungsi secara efektif, dan berkelanjutan, pengelolaan desa wisata dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi program, dan pendampingan teknis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Dari hasil observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka kebijakan pengembangan desa wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berperan sebagai aktor pembina yang menjalankan fungsi pengelolaan melalui penyusunan program pelatihan, pendampingan teknis, serta fasilitasi kebutuhan desa wisata. Selain itu, Disparbud juga terlibat dalam pembinaan strategis bagi desa wisata yang mengikuti ajang nasional seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Namun demikian, efektivitas pengelolaan masih menghadapi tantangan pada aspek keberlanjutan program pelatihan dan tingkat kesadaran wisata masyarakat, sehingga memerlukan penguatan kebijakan yang berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pengawasan

Pengawasan mengacu pada pemantauan, dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan desa wisata berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan desa wisata di kabupaten Sinjai, pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bertujuan untuk menjamin konsistensi upaya mengembangkan wisata yang ada pada desa wisata, serta menjaga agar seluruh aktivitas kepariwisataan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dalam kebijakan desa wisata di Kabupaten Sinjai dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis koordinasi untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata berjalan sesuai ketentuan administratif, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mendukung konsistensi arah kebijakan pariwisata daerah. dilakukan permintaan laporan kunjungan secara berkala pada masing-masing desa wisata dan melalui kunjungan langsung ke lapangan untuk memberikan arahan terkait pembangunan fisik destinasi wisata. Melalui pengawasan ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, memberikan umpan balik kepada pengelola, serta menyusun langkah-langkah pembinaan lanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan. Dengan demikian, pengawasan tidak sekedar berfungsi sebagai alat kontrol, namun juga sebagai bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan yang mendukung terciptanya desa wisata yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.

Tata Kelola Desa Wisata Di Kabupaten Sinjai

Tata kelola desa wisata di Kabupaten Sinjai merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Tata kelola ini tidak hanya mencerminkan bagaimana kebijakan dan program pemerintah diimplementasikan di tingkat desa, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana, serta keterlibatan masyarakat dapat bersinergi dalam mendukung pengelolaan potensi wisata secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, tata kelola desa wisata dianalisis melalui tujuh indikator yaitu kelembagaan, atraksi, amenitas, aksesibilitas, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, dan Promosi.

Kelembagaan

Struktur kelembagaan desa wisata merupakan fondasi penting dalam tata kelola destinasi wisata. Kelembagaan mencakup struktur lembaga yang terlibat dalam upaya pengembangan desa wisata. Dari hasil observasi dan wawancara pada tiga Desa Wisata di Kabupaten Sinjai (Desa Wisata Panaikang, Desa Wisata Barania, Desa Wisata Tompobulu) dapat disimpulkan bahwa aspek kelembagaan dalam tata kelola desa wisata di Kabupaten Sinjai menunjukkan variasi tingkat keberfungsian, dan partisipasi. Di Desa Wisata Panaikang kelembagaan telah terbentuk secara formal dan berjalan secara fungsional. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan pola tata kelola kelembagaan yang kolaboratif dalam upaya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

Sementara di Desa Wisata Barania kelembagaan desa wisata juga menunjukkan struktur yang berkembang dengan peran aktif pemerintah desa dalam membangun kemitraan dengan Pokdarwis. Berbeda dengan kedua desa wisata tersebut, kelembagaan Pokdarwis di Desa Tompobulu masih bersifat administratif dan belum berfungsi secara maksimal. Minimnya partisipasi pengurus akibat kesibukan di luar desa menyebabkan rendahnya efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan potensi wisata yang ada.

Atraksi

Atraksi atau daya tarik merupakan aset-aset yang dapat menarik wisatawan lokal maupun internasional. Atraksi mencakup segala bentuk potensi wisata yang dapat dinikmati, dilihat, atau dialami oleh wisatawan baik yang bersifat alam, buatan manusia maupun budaya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tiga desa wisata di kabupaten Sinjai yaitu Desa Panaikang, Desa Barania, dan Desa Tompobulu terkait daya tarik wisata dapat disimpulkan bahwa Daya tarik wisata di Kabupaten Sinjai menunjukkan keragaman potensi berbasis lokal yang dimanfaatkan secara khas oleh masing-masing desa wisata.

Desa Panaikang mengembangkan potensi wisata alam pesisir, dengan Pantai Mallenreng sebagai ikon utama yang dikelola kolaboratif antara Bumdes, pemerintah desa, dan Pokdarwis, serta didukung partisipasi masyarakat dan wisata fadaliang yang dikelola oleh swasta. Desa Barania mengangkat potensi pertanian sebagai basis daya tarik wisata, dengan pendekatan *community-based tourism* yang memanfaatkan lahan milik masyarakat yaitu kampoeng galung, titik 1000, air terjun salu birayya, dan pattiro highland, serta berhasil meraih penghargaan nasional pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori *Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability* (CHSE) berkat sinergi berbagai aktor lokal. Sementara itu, Desa Tompobulu menonjolkan wisata berbasis adat dan budaya, khususnya tradisi mappugau sihanua dan rumah adat Karampuang, yang

memiliki nilai eksklusif dan spiritual serta menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah.

Amenitas

Amenitas dalam tata kelola mencakup dari kelengkapan sarana, prasarana yang mendukung aktifitas layanan bagi wisatawan dalam upaya pengembangan dan pengelolaan desa wisata, keberadaan amenities sangat penting untuk memastikan wisatawan merasa nyaman, aman, dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Setiap desa wisata memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyediakan amenities, sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan pengunjung, sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penentu kenyamanan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada ketiga desa wisata yang ada di kabupaten Sinjai, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan amenities di ketiga desa wisata di Kabupaten Sinjai menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda. Desa Wisata Panaikang dan Barania telah menyediakan berbagai sarana prasarana penunjang seperti toilet, gazebo, tempat parkir, dan spot foto, meskipun masih diperlukan pemeliharaan dan penambahan. Sementara itu, Desa Wisata Tompobulu masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan amenities dasar, khususnya di kawasan adat Karampuang. Perbedaan ini mencerminkan perlunya pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk menjamin kenyamanan dan keberlanjutan kunjungan wisatawan.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan dan tata kelola desa wisata, karena menentukan sejauh mana kemudahan wisatawan dalam menjangkau destinasi. Aksesibilitas tidak hanya mencakup kondisi infrastruktur jalan, tetapi juga ketersediaan transportasi, petunjuk arah, dan kemudahan akses terhadap lokasi wisata. aksesibilitas adalah salah satu aspek kunci yang menghubungkan desa dengan pusat kegiatan dan destinasi wisata utama.

Dari hasil observasi dan wawancara pada ketiga desa wisata di Kabupaten Sinjai yaitu Desa Panaikang, Desa Barania, dan Desa Tompobulu dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pada ketiga desa wisata di Kabupaten Sinjai menunjukkan kondisi yang bervariasi. Desa Barania memiliki akses yang relatif baik karena lokasi objek wisata berada di dekat jalan utama. Desa Panaikang telah memiliki akses utama yang memadai, namun masih menghadapi kendala pada jalan menuju Pantai Mallenreng yang belum layak dilalui. Sementara itu, Desa Tompobulu masih menghadapi tantangan signifikan terkait kerusakan dan keterbatasan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan dan peningkatan aksesibilitas masih menjadi aspek krusial dalam mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia mencakup keterampilan dan kemampuan pengelola dan masyarakat desa wisata dalam mengelola desa wisata. Penelitian ini menelaah bagaimana kondisi dan peran sumber daya manusia di tiga desa wisata, yaitu Desa Panaikang, Desa Barania, dan Desa Tompobulu. Ketiga desa ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi jenis destinasi, latar belakang sosial budaya masyarakat, maupun keterlibatan SDM lokal dalam tata kelola wisata.

Dari hasil observasi dan wawancara pada ketiga desa wisata di Kabupaten Sinjai yaitu Desa Wisata Panaikang, Desa Wisata Barania, dan Desa Wisata Tompobulu dapat disimpulkan bahwa tiga desa wisata di Kabupaten Sinjai menunjukkan kemampuan dan keterampilan pengelola serta partisipasi masyarakat lokal menjadi determinan utama dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata.

Di Desa Panaikang, terdapat kesadaran kolektif dari pemerintah desa, pelaku usaha, dan pengelola untuk terus meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan kelembagaan, dan pembentukan pola pikir kewirausahaan. Desa Barania menonjol dalam praktik pariwisata berbasis masyarakat, di mana penguatan SDM diperlukan tidak hanya di tingkat pengelola, tetapi juga menyeluruh kepada masyarakat sebagai pemilik lahan dan pelaku usaha wisata. Sementara itu, Desa Tompobulu menekankan pentingnya SDM dalam menjaga kearifan lokal melalui pengelolaan destinasi berbasis budaya, namun menghadapi tantangan pada kelembagaan Pokdarwis yang tidak aktif.

Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu indikator penting dalam tata kelola desa wisata yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal seperti dinas pariwisata, lembaga pendidikan, maupun komunitas pariwisata sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisatanya. Di Kabupaten Sinjai, tiga desa wisata yakni Desa Panaikang, Barania, dan Tompobulu menunjukkan pola dan dinamika kemitraan yang beragam. Pola kemitraan ini mencerminkan sejauh mana sinergi antar-stakeholder telah terbangun.

Dari hasil observasi dan wawancara pada ketiga desa wisata di Kabupaten Sinjai yaitu Desa Wisata Panaikang, Desa Wisata Barania, dan Desa Wisata Tompobulu maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola desa wisata di Kabupaten Sinjai pada aspek kemitraan menunjukkan variasi tingkat kolaborasi antardesa. Desa Panaikang telah membangun kemitraan strategis dengan pemerintah dan akademisi, yang mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan wisata. Sebaliknya, Desa Barania dan Tompobulu masih menunjukkan pola kemitraan terbatas, yang dipengaruhi oleh orientasi berbasis masyarakat dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola desa wisata sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sosial budaya lokal.

Promosi

Promosi atau pemasaran merupakan kegiatan untuk mempromosikan desa wisata kepada wisatawan. Promosi yang efektif dapat memperkuat posisi desa wisata di tengah persaingan pariwisata yang semakin kompetitif. Dalam konteks Kabupaten Sinjai, tiga desa wisata yakni Desa Panaikang, Barania, dan Tompobulu menunjukkan pendekatan promosi yang berbeda sesuai dengan potensi, sumber daya, dan dukungan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada masing-masing ketiga desa wisata yaitu Desa Wisata Panaikang, Desa Wisata Barania, dan Desa Wisata Tompobulu dapat disimpulkan bahwa Strategi promosi di tiga desa wisata Kabupaten Sinjai menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik lokal. Desa Panaikang memanfaatkan kombinasi promosi digital dan langsung melalui media sosial serta studi tiru. Desa Barania menonjolkan promosi digital melalui media sosial, website, dan partisipasi dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Sementara itu, promosi di Desa Tompobulu masih terbatas dan bersifat seremonial berbasis budaya.

Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pengelola Desa Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sinjai.

Pengembangan desa wisata tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kolaborasi dan keselarasan peran antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sinergitas keduanya menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif, dalam melaksanakan sinergitas terdapat bentuk sinergitas serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata.

Bentuk Sinergitas

Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Sinjai berlangsung dalam tiga aspek utama, yaitu penataan, pengelolaan, dan pengawasan desa wisata. Penataan desa wisata dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan penetapan desa wisata secara partisipatif dan berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyediakan sistem dan mekanisme, seperti platform Jadesta, untuk memverifikasi data dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan desa wisata. Pemerintah desa sendiri aktif mengusulkan wilayahnya dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki, sehingga proses penataan ruang menjadi lebih terarah dan sesuai karakteristik lokal.

Pengelolaan desa wisata melibatkan pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Pemerintah desa dan masyarakat berperan sebagai pelaksana utama yang mengelola destinasi wisata, sementara pemerintah daerah mendukung melalui program-program pembinaan dan pelatihan. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola desa wisata agar pengelolaan potensi lokal bisa dilakukan secara profesional dan efektif.

Pengawasan dilakukan secara koordinatif, partisipatif, dan persuasif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan, pemantauan pembangunan destinasi, serta meminta laporan secara berkala dari desa wisata. Pendekatan ini bertujuan memastikan keberlanjutan pengelolaan, kepatuhan terhadap aturan, dan pelestarian lingkungan, sekaligus menjaga kestabilan dan konsistensi pengembangan wisata desa.

Tantangan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sinjai

Tantangan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sinjai sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Tantangan pengembangan desa wisata mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan potensi wisata di wilayah tersebut. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun desa, sehingga menyebabkan pelaksanaan program pembinaan dan pembangunan fasilitas wisata tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal masih menjadi kendala besar; banyak pengelola desa wisata yang belum cukup responsif dan profesional dalam mengelola potensi desa, serta terhambat oleh rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia.

Minimnya pelatihan dan pengalaman memadai menyebabkan pengelolaan destinasi wisata belum optimal dan kurang inovatif. Di samping itu, keterbatasan dana juga berdampak pada minimnya pembangunan fasilitas penunjang wisata seperti gazebo, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya, yang esensial untuk mendukung keberhasilan destinasi. Tantangan

lain adalah regulasi yang belum sepenuhnya terpadu, sehingga proses penataan dan pengembangan desa wisata terkendala dalam keberlanjutan dan sinkronisasi program lintas sektor. Semuanya ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat lokal agar potensi wisata di Kabupaten Sinjai dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan dan Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan desa wisata telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 156 Tahun 2020 sebagai dasar hukum dalam mendorong pemanfaatan potensi lokal melalui kegiatan penataan, pengelolaan, dan pengawasan desa wisata. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara terpadu, serta perbedaan kapasitas antar desa dalam mengelola potensi yang dimiliki. Tata kelola desa wisata di tiga lokasi penelitian yaitu Desa Panaikang, Barania, dan Tompobulu menunjukkan dinamika yang beragam. Desa Panaikang dan Desa Barania memiliki kelembagaan yang lebih fungsional, amenities yang memadai, aksesibilitas yang baik, serta promosi dan kemitraan yang cukup aktif. Sementara itu, Desa Tompobulu masih menghadapi tantangan berupa kelembagaan Pokdarwis yang belum berjalan efektif, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesiapan dan keberlanjutan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan lokal dan dukungan kebijakan yang konsisten.

Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa telah terjalin melalui pembagian peran yang jelas, di mana Pemerintah Daerah berfungsi sebagai fasilitator, pembina, dan pengarah kebijakan, sementara Pemerintah Desa bertindak sebagai pelaksana kegiatan berbasis potensi lokal. Namun, sinergi ini belum optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta promosi dan branding yang belum maksimal. Aplikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kebijakan yang responsif. Saran yang dapat disampaikan adalah pentingnya penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur pendukung, serta diversifikasi strategi promosi yang menyesuaikan karakteristik lokal untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan desa wisata. Dengan demikian, desa wisata di Kabupaten Sinjai memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdoellah, Awan Y; Rusfiana, Y. (2016). BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf. Alfabeta.
- Abdul Aziz, K., Ghulam Manar, D., dkk. (2022). Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Komunitas Di Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 430–444. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34950>
- Anggraini, F. S. S., Ati, N. U., dkk, T. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 17(6), 39–49.

- Creswell, W. J. (2021). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Pp. K. R. Fawaid (ed.); Keempat). Pustaka Pelajar
- DetikSulsel. (n.d.). Disparbud Sinjai Latih 40 Peserta Terkait Pengelolaan Desa Wisata. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6816468/disparbud-sinjai-latih-40-peserta-terkait-pengelolaan-desa-wisata>
- Ekon.go.id. (2025). Menjadi Salah Satu Sektor Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata Gencar Dikembangkan Pemerintah. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6164/menjadi-salah-satu-sektor-strategis-dorong-pertumbuhan-ekonomi-pariwisata-gencar-dikembangkan-pemerintah>
- Elok Puri Maharani, A., Chandra Shasmita Haningati,., dkk. (2024). Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDES. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(2), 198–223. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31803>
- Fitrawati; Baharuddin; Sani Kiki Rasmala. (2024). *Buku Pedoman Tesis Prodi Magister Administrasi Publik* (Sumardi; Fitriani (ed.)). UMSI PRESS.
- Karima, H. Q., Nugraha, N. A. S., dkk. (2023). Peningkatan Kapasitas Pokdarwis Pada Tata Kelola Desa Wisata Kampung Tudung Di Desa Grujungan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. *IJCOSIN: Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, 3(1), 48–56. <https://doi.org/10.20895/ijcosin.v3i1.943>
- Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211–221. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1974>
- Kristiana, Y. (2023). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Tata Kelola. 6, 1–7.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. 1(3), 6.
- Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5, 103–109.
- Nugraha, G. P. (2021). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Serangan Denpasar Bali. *Media Wisata*, 19(November). <https://doi.org/10.36275/mws>
- Palupi, S., Bahri, A. S.,. (2024). Peningkatan kapasitas tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. 98–112.
- Putri, S., & Rahayu, D. (2023). Perumusan Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). 2(1), 17–24.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). In Tahta Media Group. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Rianto, Prihantoro, K., Suhirwan, dkk (2021). Kebijakan Publik Desa Wisata Solusi Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(5), 1441–1442.
- Santi Palupi, & Ridwan M.O. Belu. (2023). Bimbingan Teknis Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Wisata di Kawasan Penyangga Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 222–231. <https://doi.org/10.25170/mitra.v7i2.4514>

- Setiawan, D. F., Maula, D. I., dkk. (2023). Restrukturisasi Sistem Dan Tata Kelola Wisata Melalui Pendekatan Desa Wisata Dan Community Based Tourism Kabupaten Bantul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 1737. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13967>
- Setyanto, T. J., Susanto, D. R., & Masjhoer, J. M. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Desa Wisata di Kabupaten Malang. *Journal of Tourism and Creativity*, 8(2), 166. <https://doi.org/10.19184/jtc.v8i2.47801>
- Wibowo, B., Suherlan, dkk. (2022). Analisis Tata Kelola Kolaboratif Desa Wisata yang Mandiri dan Berkelanjutan: Investigasi Empiris dari Ngargoretno-Magelang. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(1), 75–84. <https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.646>
- Wirdayanti, A., Asri, A., dkk.. (2021). Pedoman Desa Wisata. Pedoman Desa Wisata KEMENPAREKRAF 2019, 1–94. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>